APRESIASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, OMBUDSMAN RI TEMUI PEMPROV DKI JAKARTA

Jum'at, 03 Juli 2026 - Nurul Istiamuji

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin, Partono, dan Syafrida S. Rasahan didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Dedy Irsan melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Ombudsman RI Partono menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sejak 2022 hingga mencapai kategori tertinggi pada tahun 2025.

"Kami apresiasi atas komitmennya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun. Harapannya tentu agar Pemprov DKI Jakarta tidak berpuas diri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya karena Jakarta ini dapat dikatakan sebagai jendelanya Indonesia," ujar Partono.

Meski demikian, Ombudsman RI mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu menjadi perhatian. Tercatat hingga pertengahan tahun 2026, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menerima sebanyak 566 laporan masyarakat. Adapun dugaan maladministrasi yang paling banyak ditemukan berupa penundaan berlarut dalam penyelesaian pelayanan, disusul penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, dan tidak kompeten dalam memberikan pelayanan. Substansi laporan didominasi persoalan pertanahan, pendidikan, serta pelayanan administrasi pemerintahan.

Ombudsman RI juga menyampaikan rencana pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 atau Opini Ombudsman RI yang akan berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Penilaian akan mencakup berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan kepolisian. Untuk itu, Ombudsman RI berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi sosialisasi kepada perangkat daerah sebelum proses penilaian dimulai.

"Kami berharap pada akhir Juli dapat dilakukan sosialisasi kepada perangkat daerah yang menjadi objek penilaian agar seluruh proses berjalan efektif dan menghasilkan perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan," kata Partono.

Selain itu, Ombudsman RI juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan bagi Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya terkait penyediaan sarana prasarana perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas pengawasan pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik pertemuan tersebut dan terbuka untuk berkoodinasi lebih lanjut. Terkait pelayanan publik, ia menyampaikan komitmennya agar pelayanan publik di DKI Jakarta lebih transparan. "Saya adalah orang yang memakai keyakinan hidup, diawasi satu orang ataupun diawasi publik, lebih baik diawasi publik," ujarnya.

Pramono juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan anggaran pada sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah terus menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penataan kawasan melalui relokasi warga yang tinggal di area tempat pemakaman umum ke rumah susun milik pemerintah.

Terkait Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 atau Opini Ombudsman RI, Pramono akan meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung proses penilaian serta berkoordinasi dengan Inspektorat dan perangkat daerah terkait. Melalui pertemuan ini, Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)